

Wacana “Deep Learning” dalam Kebijakan Pendidikan: Analisis Wacana Kritis terhadap Representasi Guru dalam Artikel Melintas.id

Tuti Sugilestari^{1✉}, SMP Negeri 4 Ngrampah, Jawa Barat, Indonesia

Teti Sobari², Sekolah Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi, Indonesia

✉ lestarisugi06@gmail.com

Abstrak: Perubahan paradigma pendidikan di Indonesia menuntut penerapan model pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, salah satunya melalui konsep *Deep Learning* yang diadopsi dalam Kurikulum Merdeka. Namun, di balik retorika inovasi tersebut, muncul beragam tanggapan dari para pendidik yang mempertanyakan kesiapan dan relevansinya terhadap realitas sosial pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana tentang *Deep Learning* dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ruang media massa melalui analisis terhadap artikel berita berjudul “*Deep Learning: Inovasi atau Beban Baru? Tanggapan Guru atas Terobosan Menteri Pendidikan*” yang dimuat di portal Melintas.id tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, dengan menelaah tiga dimensi analisis: (1) dimensi teks yang mencermati struktur linguistik dan representasi ideologis dalam bahasa, (2) dimensi praktik wacana yang menelusuri proses produksi dan konsumsi teks media, serta (3) dimensi praktik sosial yang mengaitkan wacana dengan konteks sosial dan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa teks berita tersebut menampilkan pertarungan makna antara wacana inovasi yang dilegitimasi pemerintah dan wacana resistensi yang diartikulasikan oleh guru. Media menggunakan strategi linguistik berupa diksi evaluatif dan nominalisasi yang memperlihatkan ketegangan antara idealisasi kebijakan dan realitas lapangan. Pada tingkat praktik wacana, Melintas.id berperan sebagai media reflektif yang menghadirkan intertekstualitas dengan wacana kebijakan pendidikan nasional dan pengalaman guru. Sementara pada tingkat praktik sosial, pemberitaan mencerminkan ketimpangan ideologis antara modernisasi pendidikan dan keterbatasan struktural sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana *Deep Learning* dalam media bukan sekadar isu pedagogis, melainkan praktik ideologis yang menggambarkan relasi kuasa antara negara, guru, dan media. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi kritis bagi pendidik untuk memahami kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang sarat nilai dan kepentingan.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, *Deep Learning*, Kebijakan Pendidikan, Media Massa, Kurikulum Merdeka

Abstract: The paradigm shift in Indonesian education demands the implementation of learning models that foster higher-order thinking skills, one of which is through the concept of *Deep Learning* adopted in the Merdeka Curriculum. However, behind the rhetoric of innovation, various responses have emerged from educators who question its readiness and relevance to the social realities of national education. This study aims to reveal how the discourse on *Deep Learning* is constructed and debated in the mass media through an analysis of a news article titled “*Deep Learning: Innovation or New Burden? Teachers’ Responses to the Minister of Education’s Breakthrough*” published by Melintas.id in 2024. This research employs Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) approach by examining three

analytical dimensions: (1) the textual dimension, which scrutinizes linguistic structures and ideological representations within the language; (2) the discourse practice dimension, which explores the processes of media text production and consumption; and (3) the sociocultural practice dimension, which links the discourse to broader social contexts and power relations within educational policymaking. The findings indicate that the news text presents a struggle of meanings between the innovation discourse legitimized by the government and the resistance discourse articulated by teachers. The media employs linguistic strategies such as evaluative diction and nominalization to highlight the tension between the idealization of policy and on-the-ground realities. At the level of discourse practice, Melintas.id functions as a reflective media outlet that brings intertextuality into play by connecting national education policy discourse with teachers' lived experiences. Meanwhile, at the level of sociocultural practice, the reporting reflects ideological disparities between educational modernization and the structural limitations faced by schools. This study concludes that the Deep Learning discourse in the media is not merely a pedagogical issue but an ideological practice that portrays the power relations among the state, teachers, and the media. These findings underscore the importance of critical literacy for educators in understanding education policies not merely as technical procedures but as social constructions infused with values and interests.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Deep Learning, Education Policy, Mass Media, Merdeka Curriculum

Citation: Tuti Sugilestari., Teti Sobari. (2026). Wacana "Deep Learning" dalam Kebijakan Pendidikan: Analisis Wacana Kritis terhadap Representasi Guru dalam Artikel Melintas.id. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 6 (1), 33-44.



Copyright ©tahunEUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)

Published by Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan di Indonesia dewasa ini bergerak menuju paradigma pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Dalam konteks global, gagasan *Deep Learning* atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu konsep pedagogis yang dipromosikan untuk menghadapi tuntutan abad ke-21 (Dinata et al., 2025). Model ini tidak sekadar menekankan aspek kognitif, melainkan juga afektif dan sosial, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata serta membangun pemahaman yang bersifat reflektif

Di Indonesia, gagasan *Deep Learning* diadopsi sebagai bagian dari semangat Kurikulum Merdeka, yang secara ideologis berangkat dari prinsip kemerdekaan belajar dan berpikir kritis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa pembelajaran mendalam diharapkan menjadi cara baru untuk menumbuhkan kemampuan refleksi dan kreativitas siswa (Whindayati et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan kultural pendidikan Indonesia yang masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama di tingkat sekolah menengah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa *Deep Learning* sebagai inovasi pedagogis sering kali menghadapi tantangan dalam konteks implementasi. Guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran sering kali mengalami tekanan ganda: di satu sisi dituntut untuk menguasai teknologi digital dan metode pembelajaran inovatif, namun di sisi lain masih harus berhadapan dengan kendala sarana, waktu, dan beban administratif (Maulida et al., 2025). Hasil penelitian World Bank (2022) bahkan menegaskan bahwa banyak guru di Indonesia belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengadaptasi model pembelajaran abad ke-21. UNICEF (2023) juga mencatat bahwa ketimpangan akses digital antarwilayah memperlebar jurang kualitas pendidikan, sehingga idealisasi pembelajaran berbasis teknologi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan baru.

Dalam kondisi semacam itu, muncul pertanyaan penting: sejauh mana konsep *Deep Learning* yang dikembangkan dari teori pendidikan global benar-benar dapat diimplementasikan dalam konteks lokal Indonesia? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika wacana kebijakan tidak hanya hadir di ruang akademik, tetapi juga di ruang publik melalui media massa. Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang kebijakan pendidikan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen ideologis yang dapat memperkuat atau justru menggugat legitimasi kekuasaan (Permana & Hamdani, 2025). Dalam konteks ini, artikel “*Deep Learning: Inovasi atau Beban Baru? Tanggapan Guru atas Terobosan Menteri Pendidikan*” yang dimuat di portal berita *Melintas.id* menjadi representasi menarik dari bagaimana media mengonstruksi wacana kebijakan pendidikan. Melalui struktur naratif dan pilihan bahasa tertentu, artikel tersebut menampilkan dua kutub makna: *inovasi* sebagai simbol kemajuan dan *beban* sebagai representasi problem implementasi. Di balik dikotomi tersebut, tersembunyi praktik ideologis yang memperlihatkan bagaimana media berperan dalam membingkai hubungan antara pemerintah dan guru sebagai pelaksana kebijakan.

Kajian terhadap wacana semacam ini penting karena pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pedagogis, melainkan juga sebagai arena kekuasaan dan ideologi. Apple (2012) dan Giroux (2014) mengingatkan bahwa setiap kebijakan pendidikan selalu membawa nilai-nilai tertentu yang mencerminkan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, *Deep Learning* tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan belajar, tetapi juga sebagai wacana kekuasaan yang menuntut legitimasi sosial melalui media. Representasi guru dalam artikel *Melintas.id* dapat dilihat sebagai cerminan bagaimana otoritas kebijakan diartikulasikan, dinegosiasikan, dan bahkan ditentang di ruang publik digital.

Untuk mengungkap dinamika tersebut, analisis ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, yang melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan praktik sosial yang sarat ideologi. Fairclough (1995) mengembangkan kerangka tiga dimensi: (1) *analisis teks* untuk menelusuri struktur linguistik dan pilihan leksikal yang

membentuk makna, (2) *analisis praktik wacana* yang menelaah proses produksi dan konsumsi teks, serta (3) *analisis praktik sosial* untuk memahami hubungan wacana dengan kekuasaan, kebijakan, dan ideologi. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berhenti pada level bahasa, tetapi menembus ke struktur sosial yang melatarbelakanginya.

Meskipun kajian mengenai *Deep Learning* dalam pendidikan Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi pembelajaran, pengembangan kompetensi abad ke-21, serta kesiapan guru dalam menerapkan pendekatan tersebut. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan *Deep Learning* sebagai konsep pedagogis yang perlu diimplementasikan secara efektif di sekolah. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana konsep tersebut dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ruang publik melalui media massa, khususnya dengan menggunakan perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada aspek representasi dan konstruksi wacana *Deep Learning* dalam media. Padahal media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap representasi guru, pemerintah, dan kebijakan *Deep Learning* dalam teks media daring menggunakan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough, sehingga dapat mengungkap relasi bahasa, ideologi, dan kekuasaan yang membentuk wacana pendidikan di ruang publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan bentuk bahasa dalam teks berita, tetapi juga menyingkap bagaimana wacana *Deep Learning* dimaknai, diperebutkan, dan disebarluaskan dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia. Analisis terhadap teks berita *Melintas.id* diharapkan dapat memberikan gambaran kritis tentang relasi antara wacana kebijakan, representasi media, dan realitas sosial guru di lapangan. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan kajian bahasa, media, dan pendidikan yang lebih berpihak pada guru dan siswa sebagai subjek utama pembelajaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan yang terkandung dalam teks media.

Objek penelitian berupa artikel berita berjudul “*Deep Learning*: Inovasi atau Beban Baru? Tanggapan Guru atas Terobosan Menteri Pendidikan” yang diterbitkan oleh *Melintas.id* pada tahun 2024. Pemilihan artikel tersebut dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa teks secara eksplisit membahas kebijakan *Deep Learning*, memuat pandangan pemerintah dan guru

secara bersamaan, serta merepresentasikan perdebatan yang berkembang dalam ruang publik mengenai implementasi kebijakan pendidikan.

Data penelitian berupa satuan lingual dalam teks berita yang meliputi kata, frasa, kalimat, kutipan narasumber, dan struktur wacana yang merepresentasikan pandangan mengenai *Deep Learning*. Instrumen utama penelitian adalah peneliti (human instrument) yang dibantu dengan lembar analisis berdasarkan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial.

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi terhadap artikel yang menjadi objek penelitian. Kedua, identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan unsur kebahasaan yang menunjukkan representasi, relasi, dan ideologi. Ketiga, analisis data menggunakan tiga dimensi Fairclough yang meliputi analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Keempat, interpretasi hasil analisis dengan mengaitkan temuan terhadap konteks kebijakan pendidikan dan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi teori dengan membandingkan temuan penelitian terhadap konsep Analisis Wacana Kritis Fairclough serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana kritis terhadap berita berjudul “*Deep Learning: Inovasi atau Beban Baru? Tanggapan Guru atas Terobosan Menteri Pendidikan*” dari melintas.id dilakukan dengan menggunakan kerangka Norman Fairclough (1995) yang mencakup tiga dimensi analisis: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana bahasa dalam teks media berfungsi sebagai sarana pembentukan dan pertarungan ideologi dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait penerapan *Deep Learning* dalam Kurikulum Merdeka.

1. Dimensi Teks: Representasi Linguistik dan Strategi Ideologis

Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial mengenai kebijakan *Deep Learning*. Judul berita “*Deep Learning: Inovasi atau Beban Baru?*” sendiri menciptakan konflik semantik yang menggiring pembaca untuk memaknai kebijakan ini secara ambivalen antara wacana kemajuan teknologi pendidikan dan wacana problem implementasi kebijakan.

Dalam bagian awal berita disebutkan:

“Sejumlah guru menilai penerapan *Deep Learning* belum sepenuhnya dipahami oleh pihak sekolah dan cenderung menambah beban administratif.” (melintas.id, 2024)

Penggunaan kata kerja “menilai” menandakan posisi jurnalis yang menampilkan guru sebagai pihak rasional dan kritis. Frasa “belum sepenuhnya dipahami” dan “menambah beban administratif” memiliki konotasi negatif

yang memperlihatkan resistensi terhadap wacana resmi pemerintah. Dari segi struktur, kalimat ini menggunakan nominalisasi (misalnya "penerapan *Deep Learning*") yang berfungsi mengaburkan pelaku kebijakan (siapa yang menerapkan), sebuah strategi linguistik yang menurut Fairclough umum digunakan untuk menyamarkan tanggung jawab dalam wacana institusional (Arifia et al., 2024).

Dari perspektif Fairclough, penggunaan bentuk nominalisasi dalam frasa *penerapan Deep Learning* mengaburkan pelaku utama yang bertanggung jawab atas proses implementasi (Nasrullah, 2025). Fokus pembaca diarahkan pada kebijakan sebagai objek, bukan pada pihak yang merancang atau menginstruksikan pelaksanaannya. Strategi linguistik semacam ini sering ditemukan dalam wacana institusional untuk mereduksi tanggung jawab aktor tertentu.

Di sisi lain, pemerintah direpresentasikan sebagai otoritas yang menegaskan legitimasi kebijakan, seperti tampak dalam kutipan:

"Menteri Pendidikan menegaskan bahwa konsep *Deep Learning* bukan sekadar metode, tetapi paradigma baru pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif."

Kata "menegaskan" menandakan kekuatan dan keabsahan wacana kekuasaan (Van Dijk, 2008). Frasa "paradigma baru pembelajaran" adalah bentuk metafora progresif yang mengasosiasikan kebijakan dengan kemajuan dan modernisasi. Dengan demikian, teks berita ini menampilkan dua orientasi ideologis legitimasi pemerintah terhadap *Deep Learning* sebagai inovasi, dan resistensi guru sebagai representasi realitas lapangan.

Pola keseimbangan ini menciptakan kesan netralitas semu (*apparent neutrality*), di mana media tampak berimbang, tetapi sesungguhnya memberi ruang lebih besar bagi wacana resistif dengan memperpanjang kutipan dari pihak guru dibanding pemerintah. Hal ini memperlihatkan adanya strategi ideologis media dalam membentuk simpati pembaca terhadap pihak lapangan.

2. Dimensi Praktik Wacana: Produksi, Sirkulasi, dan Intertekstualitas

Dimensi praktik wacana berfokus pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks komunikasi media. Media melintas.id dikenal sebagai portal berita yang menyoroti isu pendidikan dan kebijakan publik dengan pendekatan reflektif dan argumentatif. Proses produksi wacana ini dapat dipahami sebagai bentuk respon jurnalisme pendidikan terhadap hegemoni kebijakan pemerintah.

Dalam paragraf tengah berita disebutkan:

"Guru-guru di daerah merasa penerapan *Deep Learning* belum disertai pelatihan memadai, sementara sekolah dituntut segera menyesuaikan diri dengan kurikulum baru."

Kutipan ini menunjukkan praktik intertekstualitas karena merujuk pada wacana nasional tentang Kurikulum Merdeka dan pelatihan guru. Dengan

demikian, teks ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengaitkan isu *Deep Learning* dengan konteks kebijakan pendidikan yang lebih luas. Menurut Fairclough, praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana teks media menjadi bagian dari rantai wacana (*chain of discourse*) yang menghubungkan berbagai dokumen, pernyataan, dan pengalaman sosial (Numertayasa, 2024).

Dari sisi konsumsi wacana, target pembaca melintas.id adalah pendidik, akademisi, dan masyarakat kritis yang terlibat dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, konstruksi teks menggunakan bahasa yang semi-akademik dan argumentatif, bukan sekadar informatif. Media berperan aktif dalam membentuk kesadaran kritis pembaca melalui penyajian data dan testimoni empiric (Rizqiani et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa praktik wacana melintas.id bersifat counter-hegemonic, yakni menantang wacana dominan pemerintah dengan menghadirkan suara lapangan sebagai bentuk kontrol sosial.

Verba *menegaskan* menunjukkan otoritas dan legitimasi yang dimiliki pemerintah dalam membentuk makna suatu kebijakan. Kata tersebut mengandung kekuatan simbolik karena menempatkan pemerintah sebagai sumber kebenaran yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan konsep pendidikan.

Frasa *paradigma baru pembelajaran* merupakan bentuk metafora progresif yang mengasosiasikan *Deep Learning* dengan kemajuan, inovasi, dan transformasi pendidikan. Penggunaan istilah *berpikir kritis dan kreatif* juga merupakan bagian dari wacana pendidikan abad ke-21 yang secara ideologis dikaitkan dengan modernisasi sistem Pendidikan (Anugrahsari & Ismail, 2023).

Namun demikian, konstruksi bahasa tersebut tidak menjelaskan secara rinci kondisi riil sekolah yang menjadi lokasi implementasi kebijakan. Akibatnya, muncul jarak antara idealisasi konsep yang dibangun pemerintah dengan pengalaman empiris yang dialami guru di lapangan.

3. Dimensi Praktik Sosial: Konteks Sosio-Politik dan Ideologis Kebijakan Pendidikan

Pada tataran praktik sosial, wacana *Deep Learning* mencerminkan realitas sosial yang lebih luas, yakni pergeseran paradigma pendidikan Indonesia menuju digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Namun, kebijakan tersebut berlangsung di tengah ketimpangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam berita disebutkan:

"Banyak sekolah di daerah masih kekurangan perangkat digital dan jaringan internet yang stabil, sehingga konsep *Deep Learning* sulit diterapkan secara utuh."

Kutipan ini memperlihatkan relasi kuasa antara pusat dan daerah, serta antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pemerintah memproduksi wacana modernisasi pendidikan yang bercorak teknokratis, sementara guru di lapangan menghadapi realitas sosial yang berbasis keterbatasan struktural. Menurut Fairclough kondisi ini menggambarkan bagaimana wacana ideologis

negara membentuk praktik sosial tertentu dan mengatur apa yang dianggap mungkin atau sah dalam ranah Pendidikan (Mamduh & Hidayat, 2019).

Selain itu, penggunaan istilah *Deep Learning* itu sendiri menandakan adanya adopsi istilah global yang membawa ideologi neoliberal seperti efisiensi, kompetensi, dan daya saing (Dinata et al., 2025). Dengan mengusung wacana teknologi tinggi dalam sistem pendidikan yang belum merata infrastrukturnya, kebijakan ini memperlihatkan ketimpangan ideologis antara simbol kemajuan dan kenyataan sosial.

Melalui cara pemberitaan yang menonjolkan suara guru, media melintas.id berperan sebagai arena negosiasi wacana antara ideologi negara dan realitas sosial lapangan. Secara sosial, teks ini menggambarkan dialektika antara wacana inovasi dan resistensi, di mana praktik sosial guru tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki agensi untuk menafsirkan, menolak, atau menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai kondisi lokal.

Kutipan di atas memperlihatkan adanya hubungan intertekstual dengan berbagai kebijakan pendidikan sebelumnya yang juga menuntut perubahan praktik pembelajaran melalui program pelatihan guru. Kehadiran kata *dituntut* menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang bersifat vertikal antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan (Abiyyu & Anshori, 2025).

Melalui pemilihan kutipan ini, Melintas.id tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi narasi bahwa implementasi kebijakan berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, media berfungsi sebagai ruang artikulasi bagi suara guru yang sering kali kurang mendapatkan ruang dalam dokumen resmi pemerintah.

Dari sisi produksi teks, pemberitaan ini menunjukkan kecenderungan media untuk menghadirkan perspektif yang lebih dekat dengan pengalaman praktis guru. Meskipun pemerintah tetap diberikan ruang untuk menjelaskan kebijakannya, proporsi narasi yang lebih banyak berasal dari pengalaman lapangan memperlihatkan posisi media yang relatif kritis terhadap kebijakan.

4. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana *Deep Learning* dalam media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi mengenai kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna dan negosiasi ideologi antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Temuan ini memperkuat relevansi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam mengungkap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan kebijakan pendidikan yang direpresentasikan melalui media.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi kritis bagi pendidik dalam memahami berbagai kebijakan pendidikan yang berkembang di ruang publik. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang mampu menafsirkan, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian,

guru memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara kebijakan yang bersifat normatif dengan praktik pembelajaran yang kontekstual dan relevan bagi peserta didik.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar implementasi inovasi pendidikan, termasuk *Deep Learning*, disertai dengan dukungan sarana, pelatihan, dan pendampingan yang memadai. Hal ini penting untuk meminimalkan kesenjangan antara idealisasi kebijakan dan realitas sekolah, serta memastikan bahwa setiap inovasi pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan di berbagai konteks pendidikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana *Deep Learning* dalam artikel "*Deep Learning: Inovasi atau Beban Baru? Tanggapan Guru atas Terobosan Menteri Pendidikan*" dikonstruksi melalui pertarungan makna antara wacana inovasi yang dilegitimasi pemerintah dan wacana resistensi yang disuarakan guru. Pada dimensi teks ditemukan penggunaan strategi linguistik yang merepresentasikan ketegangan antara idealisasi kebijakan dan realitas lapangan. Pada dimensi praktik wacana, media berperan sebagai ruang intertekstual yang mempertemukan berbagai perspektif terkait kebijakan pendidikan. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, wacana *Deep Learning* mencerminkan relasi kuasa dan ketimpangan antara agenda modernisasi pendidikan dengan kondisi struktural sekolah yang beragam. Dengan demikian, wacana *Deep Learning* dalam media tidak hanya merepresentasikan isu pedagogis, tetapi juga praktik ideologis yang berkaitan dengan kepentingan, kekuasaan, dan legitimasi kebijakan pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu teks berita sebagai sumber data sehingga hasil analisis belum dapat menggambarkan keseluruhan konstruksi wacana *Deep Learning* yang berkembang di berbagai media. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis teks media dan belum melibatkan perspektif langsung dari guru, pembuat kebijakan, maupun pembaca media.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis lebih banyak teks dari berbagai platform media, membandingkan representasi wacana antar media, serta mengombinasikan Analisis Wacana Kritis dengan wawancara atau studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan penerimaan kebijakan *Deep Learning* dalam konteks pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyu, M. F., & Anshori, I. (2025). Relasi Kuasa Antara Kepala Sekolah Dan Guru: Kajian Teoretis Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kinerja. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 677–686.
- Anugrah Sari, I., & Ismail, I. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21: Filsafat Pendidikan Dalam Wujud Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 10–25.
- Arifia, A. Y., Diana, N., & Fakhriyyah, D. D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 806–815.
- Dinata, Y., Dalillah, A., Septiani, I., & Mudasir, M. (2025). Tantangan Epistemologis Dalam Implementasi *Deep Learning* Di Pendidikan Indonesia: Refleksi Atas Kesenjangan Konsep, Kompetensi, Dan Realitas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 534–548.
- Mamduh, N., & Hidayat, R. (2019). Reproduksi Ideologi Pada Buku Teks Sosiologi SMA Kurikulum 2006 Dan 2013. *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 1(2), 117–131.
- Maulida, F., Siagian, M. I., Siregar, S. K., & Fadilah, D. (2025). Peran Ganda Guru: Mengajar Dan Membimbing Di Tengah Tantangan Belajar Siswa. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11682–11686.
- Nasrullah, R. (2025). *Metodologi Penelitian Linguistik*. CV Eureka Media Aksara.
- Numertayasa, I. W. (2024). ANALISIS WACANA KRITIS PADA WACANA DI MEDIA SOSIAL DENGAN DISCOURSE NETWORK ANALYSIS. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, Dan Sastra*, 4(1), 63–71.
- Permana, A. R., & Hamdani, A. (2025). Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10. A), 57–64.
- Rizqiani, D. A., Herlina, S., Astuti, M. T., & Novitri, S. (2025). Meningkatkan Kesadaran Kritis Siswa Melalui Strategi Membaca Kritis Teks Naratif. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 60–65.
- Whindayati, A., Fauziah, R. N., Fatimah, S., & Handayani, D. (2025). Penguatan Kompetensi Abad 21 Dalam Pembelajaran Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Pendidik Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 240–262.